

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mekanisme berasal dari dua kata Yunani: *mechane*, yang mengacu pada instrumen, perangkat beban, atau peralatan, dan *mechos*, yang mengacu pada teknik, berarti, dan secara teknis melakukan suatu fungsi. Mekanisme juga bisa dilihat sebagai perspektif yang menggambarkan interaksi antara komponen sistem. Hal ini juga didukung Selli Marsela (2020) melalui tugas akhirnya “Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi” dengan hasil penulisannya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya mekanisme dalam penyaluran dana bantuan keluarga harapan bisa digambarkan memakai bagan alir yang akan mempermudah dalam pemberian informasi mekanisme penyaluran dana bantuan sosial.

Proses pengolahan data transaksi keuangan yang terdiri dari beberapa macam kerangka atau bagian fisik dan non-aktual yang saling berkaitan serta bekerja sama hingga informasi terkait keuangan bisa dihasilkan termasuk definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Susanto (2017: 80). Sistem informasi akuntansi yakni bagian penting dari sebuah organisasi, sistem informasi akuntansi memberi catatan yang berguna dalam pembuatan persetujuan, misalnya perencanaan, penganggaran, pengendalian serta dalam menentukan kebijakan. Pada sektor publik, sistem informasi akuntansi dihubungkan dengan rangkaian tahapan dalam kegiatan dimulai dari pengumpulan data, pencatatan serta ringkasan guna menghasilkan laporan keuangan (Bastian, 2007: 4).

Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK (2002) menyebutkan 3 tujuan SIA yang berlaku yaitu, akuntabilitas, pemberian informasi keuangan pemerintahan dan transparansi keuangan publik.(Yusmita dan Evayani 2020 : 2)

Dampak dari Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia ini menimbulkan efek jera di segala bidang, seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan, serta menyebar ke masyarakat individu di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Di Indonesia dampak Covid-19 dirasakan bagi segala kalangan. Hampir di semua aspek mengalami penghambatan, terutama di aspek ekonomi. Aspek ekonomi termasuk satu dari hal yang penting bagi penunjang kesejahteraan masyarakat. Menurut Hanoatubun (2020: 386), aspek ekonomi menjadi satu dari faktor penting dalam mendukung perbaikan pembangunan nasional dikarenakan kesejahteraan masyarakat di negara bisa meningkatkan pembangunan nasional.

Dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Efek dari pendekatan ini membuat kegiatan yang biasa dilaksanakan harus dihentikan. Segala aktivitas menjadi tertanggung, seperti kegiatan industri, aktivitas perkantoran terpaksa dihentikan. Demikian pula, aktivitas pendidikan, administrasi publik, tempat perbelanjaan, warung makan, dan tempat-tempat industri perjalanan juga menghadapi hambatan. Dengan dampak ekonomi yang besar, pemerintah mengambil strategi untuk menolong masyarakat yang

menghadapi dampak pandemi Covid-19 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dengan program bantuan sosial tunai.

Akibat Covid-19, Menteri Sosial sebelumnya Juliari Peter Batubara tersangkut kasus korupsi sistem bansos. Kasus ini berawal dari pembelian program bansos penanganan Covid-19 seperti paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan total nilai sekitar Rp 5,9 triliun, 272 kontrak, dan dua periode. Dalam pelaksana inisiatif tersebut, para mitra dilaporkan dipilih secara langsung dan mencapai kesepakatan harga untuk setiap paket bantuan sosial. Biaya yang disepakati yakni Rp 10.000 per paket bansos dari total nilai Rp 300.000 per paket bansos. Dalam pelaksana paket sembako tahap pertama, Juliari mendapat suap Rp. 8,2 miliar, dan pada periode kedua, ia menerima suap sebesar Rp. Total suap yang diterima Juliari mencapai Rp 17 miliar. Ternyata, dana tersebut dihabiskan untuk pengeluaran pribadi. Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 sampai 1, sampai Juliari divonis 12 tahun penjara.

Hasil dari pengamatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang terhadap sosialisasi bantuan sosial sangat baik. Data yang didapat dari Kementerian Sosial segera dicek dan dikonfirmasi kelengkapan data calon penerima bantuan sosial. Bagi calon penerima bantuan sosial yang datanya kurang lengkap mereka akan dikecualikan sebagai penerima bantuan sosial. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten

Sampang termasuk penghubung antara Kementerian Sosial sebagai penyalur informasi dan Bank Himbara sebagai lembaga penyaluran bantuan sosial. Namun, ketidakrataannya pembagian bantuan sosial sering kali terjadi. Warga yang berhak menerima bantuan sosial sering terlewat.

Berlandaskan landasan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang sudah dijelaskan di atas topik akan diangkat dalam laporan praktik kerja lapangan ini yaitu bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berlandaskan uraian sebelumnya, alasan dilakukannya praktik kerja lapangan ini yakni untuk mendeskripsikan dan mempelajari bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Mekanisme

Mekanisme yakni kumpulan instrumen kerja yang dipakai untuk mengatasi masalah yang melibatkan proses kerja dan interaksi satu komponen dengan komponen lainnya. Menurut Moenir (2013:53), Mekanisme yakni urutan instrumen kerja yang dirancang untuk menangani suatu masalah yang berkaitan

dengan proses kerja untuk meminimalkan kegagalan dan memaksimalkan hasil.

Dari definisi diatas, bisa penulis simpulkan bahwasanya pengertian mekanisme termasuk alat kerja yang di dalamnya terdapat sebuah proses untuk menyelesaikan sebuah masalah.

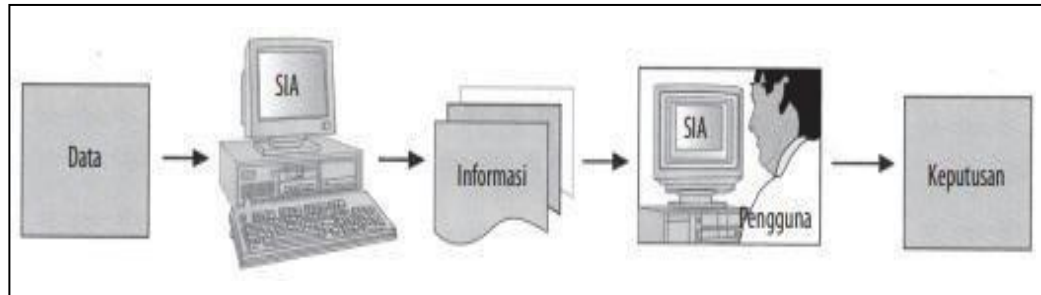
1.4.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem (*System*) yakni serangkaian data yang saling p u n y a keterikatan dalam keberhasilan tujuan. Sistem dibagi menjadi subsistem kecil akan mendukung subsistem yang lebih besar. Informasi (*Information*) yakni data yang akan dikelola serta diproses guna mencapai tujuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan baik yaitu yang diambil dari kualitas dan kuantitas dari informasi yang tersedia. Akuntansi (*Accounting*) yaitu langkah pengindentifikasian, pengklasifikasian serta pengarsipan data.

Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*) termasuk penyediaan informasi. (Romney dan Steinbart, 2015 : 11). Menurut Indrayati (2016: 2), Sistem Informasi Akuntansi termasuk komponen pengumpulan, mengklasifikasikan, memproses serta pengkomunikasian laporan keuangan yang baik dan dirancang menjadi dasar pembuatan keputusan oleh pihak eksternal & internal.

Dengan definisi tersebut akibatnya bisa dijabarkan Sistem Informasi Akuntansi yakni suatu proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data sebagai penunjang mendapat informasi yang melibatkan orang, barang, data sebagai penunjang data.

Gambar 1. 1 Sistem Informasi Akuntansi



Sumber : Romney dan Steinbart (2015 : 13)

Sistem Informasi Akuntansi mempunyai enam komponen yaitu :

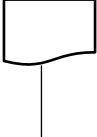
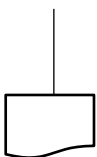
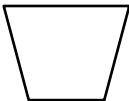
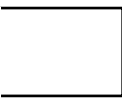
1. Personal yang menjalankan.
2. Langkah-langkah saat pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.
3. Catatan kejadian yang berlangsung.
4. Software berguna sebagai alat pengolah informasi.
5. Penopang teknologi informasi termasuk komputer, peralatan jaringan komunikasi guna sistem informasi akuntansi.
6. Kontrol internal dan tindakan keamanan untuk penyimpanan informasi

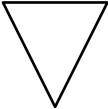
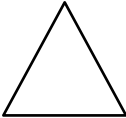
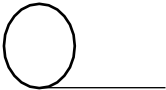
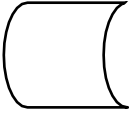
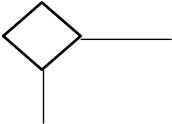
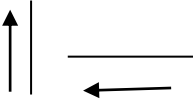
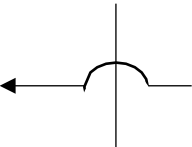
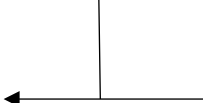
(Romney dan Steinbart, 2015 : 11)

1.4.3 Simbol-Simbol Bagan Alir

Alur dalam SIA bisa digambarkan oleh diagram alir dokumen atau dikenal sebagai diagram alir. Flowchart ini mempunyai simbol yang sama dengan flowchart sistem. Berikut ini yakni beberapa simbol yang dipakai dalam diagram alur dokumen :

Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Bagan Alir

Simbol	Nama	Keterangan
	Dokumen	dipakai guna mendeskripsikan semua jenis dokumen yang terjadi pada transaksi.
	Dokumen dan Tembusannya	Digunaka guna mendeskripsikan dokumen asli dam tembusan, nomor diletakkan pada sudut atas.
	Berbagai Dokumen	dipakai untuk mendeskripsikan serangkaian dokumen yang digunakan.
	Catatan	dipakai untuk mendeskripsikan catatan akuntansi.
	Penghubung pada halaman yang sama	dipakai sebagai penanda dokumen pada halaman tertentu.
	Akhir arus dokumen	Sebagai pengarah simbol penghubung halaman yang sama dengan nomor yang ada.
	Awal arus dokumen	Berawal dari simbol penghubung halaman yang sama .
	Penghubung halaman berbeda	dipakai sebagai simbol penanda keterkaitan flowchart dengan halaman lainnya.
	Kegiatan Manual	dipakai guna mendeskripsikan kegiatan manual.
	Keterangan, Komentar	dipakai guna menambahkan deskripsi dalam bagan.

	Arsip sementara	dipakai guna mendeskripsikan dokumen diarsip sementara, dengan simbol : A=sesuai abjad, N=sesuai nomor urut, T=sesuai tanggal.
	Arsip permanen	dipakai guna mendeskripsikan dokumen diarsip permanen dan tidak akan dilaksanakan proses lagi.
	On-line komputer proses	dipakai guna mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan komputer.
	Keying (typing verifying)	Dipakai guna mendeskripsikan input data pada komputer melalui on-line komputer.
	Pita magnetic	dipakai guna mendeskripsikan arsip pada komputer (berbentuk pita).
	On-line storage	dipakai guna mendeskripsikan arsip pada komputer (berbentuk on-line).
	Keputusan	dipakai guna mendeskripsikan proses pengambilan keputusan.
	Garis alir	dipakai guna mendeskripsikan arah prose pengolahan data, arah panah menggambar dokumen mengarah kebawah dan keatas.
	Persimpangan garis alir	dipakai guna mendeskripsikan arah masing garis.
	Persimpangan garis alir	dipakai guna mendeskripsikan dua garis yang bertemu serta satu dari garis mengikuti arus garis lainnya.

	Mulai/berakhir	Guna menentukan awal dan akhir dari sistem akuntansi.
 Dari pemasok	Masuk ke sistem	sebab tindakan di luar sistem tak perlu digambar pada flowchart, akibatnya flowchart membutuhkan simbol untuk menunjukkan login ke sistem.
 Ke sistem penjualan	Keluar dari sistem	sebab fakta bahwasanya tindakan dari luar sistem tak perlu ditampilkan dalam grafik, simbol dibutuhkan guna menunjukkan aktivitas tersebut.

Sumber : Mulyadi (2017: 47-49)

1.4.4 Akuntansi Belanja Sosial

Pernyataan 02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1 menunjukkan bahwasanya pengeluaran bisa dikategorikan menurut kategorisasi ekonominya ketika melaporkan hasil anggaran. Belanja bantuan sosial termasuk satu dari komponen perekonomian. Termasuk dalam biaya operasional yang berkaitan dengan operasional sehari-hari pemerintah pusat dan daerah yakni belanja bantuan sosial dalam PSAP No. 02.

Dalam Buletin Teknis No. 04 tentang pengungkapan belanja pemerintah, belanja bantuan sosial mengacu pada uang atau produk yang dipasok oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya sosial. Bantuan sosial bisa diberi secara langsung kepada masyarakat dan lembaga masyarakat, termasuk LSM pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial yakni pengeluaran diskresioner seperti uang

dan barang/jasa yang ditawarkan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan individu.

1.4.5 Tujuan Penggunaan Bantuan Sosial

Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua! Pengeluaran menjelaskan belanja bantuan sosial bisa dilaksanakan untuk kegiatan dalam rangka :

1. Rehabilitasi sosial yakni proses pemulihan serta peningkatan kapasitas seseorang untuk melakukan fungsi sosial sesudah mengalami gangguan sosial.
2. Perlindungan sosial, pencegahan dan penanggulangan bahaya kerentanan sosial individu atau kelompok untuk menjamin kelangsungan hidup.
3. Pemberdayaan sosial, upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat.
4. Jaminan sosial, kebijakan lembaga untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi.
5. Penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemerintah bagi individu atau kelompok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6. Penanggulangan bencana, serangkaian upaya dalam pencegahan bencana alam, tanggap darurat, serta rehabilitasi.

1.4.6 Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah federal serta negara bagian yakni penyedia bantuan sosial. Bantuan sosial bisa diberi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, pelayanan dasar, serta penanggulangan bencana. Penjelasan di atas didasarkan pada Buletin Teknis SAP Nomor 19

tentang akuntansi akrual untuk bantuan sosial dan berlaku guna bantuan yang diberi oleh masyarakat, lembaga sosial, atau lembaga non-pemerintah sepanjang tak termasuk pada anggaran pemerintah.

1.4.7 Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Berlandaskan Buletin Teknis SAP No. 19 tentang Akuntansi Akrual Bantuan Sosial Perorangan, keluarga, organisasi, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, seperti keadaan hidup yang buruk dan kesulitan sosial yang disebabkan oleh ekonomi, politik, atau bencana alam, memenuhi syarat untuk mendapat bantuan sosial. Pemerintah federal menawarkan dukungan sosial langsung atau tidak langsung kepada klien melalui perantara.

1.4.8 Bentuk Bantuan Sosial

Berlandaskan Buletin Teknis SAP No. 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual, bentuk-bentuk bantuan sosial terbagi menjadi beberapa kategori. Berikut beberapa bentuk bantuan sosial yang ditetapkan antara lain :

1. Memberikan santunan kesehatan seperti uang tunai kepada anak-anak pahlawan yang tidak mampu.
2. Bantuan kepada fakir miskin dalam bentuk beasiswa atau hibah pendidikan.
3. Bantuan makanan atau pakaian untuk anak yatim/piatu/yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara.
4. Memberikan bantuan seperti pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Bantuan seperti persiapan pemakaman diserahkan kepada sekelompok masyarakat yang kurang mampu.
6. Memberikan bantuan keuangan kepada LSM untuk mendanai penjangkauan

pencegahan HIV/AIDS di masyarakat miskin.

7. Bantuan keuangan yang dibayar kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

1.4.9 Regulasi Terkait Bantuan Sosial

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial ini sudah tercantum pada dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan. Berikut beberapa regulasi terkait pelaksana bantuan sosial, yaitu :

1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.

2. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004 (UU Nomor 40 Tahun 2004).

Ditentukan bahwasanya negara harus mendaftar ke Badan Pengelola Jaminan Sosial dan melakukan pembayaran ke program Jaminan Sosial.

3. UU Penanggulangan Bencana Tahun 2007 (UU No. 24)

Dikatakan bahwasanya pelaksana penanggulangan bencana melibatkan serangkaian tindakan termasuk keputusan kebijakan, pembangunan berisiko, pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana

Dimulai dengan fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, uraian lengkap tentang pelaksana penanggulangan bencana.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana

Disebutkan, penanganan bencana tahap prabencana, tanggap darurat, dan

pascabencana didanai oleh APBN, APBD, dan uang rakyat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan.

Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dinyatakan mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembiayaan pendidikan. Contoh di mana pemerintah federal dan kotamadya bisa berinvestasi dalam pengeluaran operasional lembaga pendidikan melalui hibah atau bantuan sosial.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Disebutkan, pengesahan APBN termasuk bagian dari upaya menjaga masyarakat dari potensi bahaya sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan material dan sosial masyarakat terpenuhi sehingga setiap orang bisa menjalani kehidupan yang bermartabat.

9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Keinginan Presiden guna mempercepat pengentasan kemiskinan dijelaskan.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharap bisa mencapai beberapa tujuan, yakni :

1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III – Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

2. mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di dunia kerja.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharap bisa memberi manfaat kepada pihak terkait :

1. Bagi penulis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Menerapkan ilmu akuntansi yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan.
- c. Mendapatkan bekal pengalaman kerja.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa lain.
- b. Sebagai gambaran bagi mahasiswa lain dengan topik yang sama.
- c. Bagi Perusahaan atau Instansi Sebagai bahan informasi, evaluasi, serta masukan yang dijadikan pertimbangan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang yang beralamatkan di Jalan Rajawali No. 7 Sampang. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 – 25 Februari 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin – jumat, pukul 07.00 – 13.00 di Bagian Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

Tabel 2. 2 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	2021					2022									
		November		Desember			Januari		Februari		Maret		April		Mei	
1	Pengajuan ide topik dan pengajuan tempat PKL															
2	Arahan dan pembekalan PKL															
3	Pengajuan perizinan tempat PKL															
4	Pembagian dosen pembimbing															
5	Pelaksanaan kegiatan PKL															
6	Penyusunan laporan kegiatan PKL															
7	Konsultasi laporan kegiatan															

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data termasuk satu dari acuan yang dipakai untuk menyusun laporan kegiatan ataupun penelitian yang dilakukan. Dengan adanya sumber data akan menjadi informasi yang akan diolah dalam penulisan ini. Dalam memperoleh data terdapat tahapan-tahapan yang dibutuhkan akibatnya dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai acuan dalam pengambilan data agar data yang diperoleh bisa dipakai untuk penyusunan Tugas Akhir.

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data pada pengerjaan Tugas Akhir ini memakai dua data sebagai sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yakni informasi diterima langsung dari orang yang terlibat. Data primer yakni fakta yang dikumpulkan pada saat penelitian dilakukan. Bapak M. Nasrun yang termasuk Kepala Bidang Penanganan Masyarakat Miskin dan Pemberdayaan Sosial diwawancarai untuk mengumpulkan sumber data ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder termasuk data didapat secara tidak langsung melalui jurnal, buku, serta UU.

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data termasuk tahapan yang strategis pada penelitian sebab tujuan utamanya yakni mengumpulkan data. Dan pendekatan pengumpulan data termasuk tahapan untuk mendapat informasi dan memperoleh penjelasan yang utuh tentang apa yang terjadi. Djaman dan Aan Komariah (2011: 23) menguraikan proses pengumpulan data pada penelitian sistematis guna mendapat data yang dibutuhkan :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara termasuk cara untuk mendapat data yang dilaksanakan secara tatap muka bersama narasumber. Data yang didapatkan dengan cara merekam ataupun melakukan pencatatan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni suatu strategi untuk mengumpulkan informasi dari

arsip vital institusi, organisasi, dan individu.

1.8.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data termasuk teknis analisis berkaitan dengan perhitungan bertujuan untuk menjelaskan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Metode analisis data yaitu proses pencarian data, merangkai secara terstruktur data didapatkan dari hasil wawancara, catatan, serta dokumentasi memakai metode analisis deskriptif.